



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1026/MENKES/SK/XI/2008
TENTANG
TIM PENEGAKAN HUKUM PERDATA DAN EKSEKUSI TANAH DEPKES
CQ. RSJ BOGOR (RS Dr. MARZOEKI MAHDI BOGOR)**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI No 739K/Pdt/2006 perlu dilaksanakan eksekusi pengosongan tanah milik Departemen Kesehatan yang digunakan sebagai lokasi Lapangan Golf dan dikuasai oleh Pengurus Bogor Golf Club;
 - b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penegakan Hukum Perdata dan Eksekusi Tanah Depkes Cq. RSJ Bogor yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan ;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3455) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN HUKUM PERDATA
DAN EKSEKUSI TANAH DEPKES CQ. RSJ BOGOR
(RS Dr. MARZOEKI MAHDI BOGOR)**



**MENTERI KESEHATAN
REI'UBLIK INDONESIA**

- Kesatu** : Membentuk Tim Penegakan Hukum Perdata dan Eksekusi Tanah Depkes Cq. RSJ Bogor (RS Dr. Marzoeki Mahdi Bogor) dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan penyelesaian Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor tentang Perintah Eksekusi/Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI No 739K/Pdt/2006;
 2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI seperti tersebut angka 1;
 3. Mensosialisasikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor tentang eksekusi Putusan Mahkamah Agung seperti tersebut angka 1;
 4. Melaksanakan eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI tersebut angka 1 yakni mengosongkan tanah Departemen Kesehatan yang digunakan sebagai lapangan Golf oleh Pengurus Bogor Golf Club;
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan eksekusi dan tugas - tugas tersebut angka 1 sampai dengan 4;
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Menteri Kesehatan RI melalui Sekretaris Jenderal Depkes;
- Keempat** : Biaya pelaksanaan tugas Tim dan pelaksanaan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung tersebut pada Diktum Kedua dibebankan pada DIPA Biro Hukum dan Organisasi Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Juni s/d 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 November 2008



Dr.dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI
KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1026/MENKES/SK/XI/2008
TANGGAL : 3 November 2008**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM PENEGAKAN HUKUM PERDATA
DAN EKSEKUSI TANAH DEPKES CQ. RSJ BOGOR (RS Dr. MARZOEKI MAHDI)**

- Pengarah** : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
2. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
- Penanggung Jawab** : 1. Kepala Kejaksaan Negeri Bogor
2. Ketua Pengadilan Negeri Bogor
3. Sekretaris Ditjen Bina Yanmed
- Koordinator** : Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Bogor
(RS Dr. Marzoeki Mahdi Bogor)
- Ketua** : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
- Wakil Ketua** : Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
- Sekretaris** : 1. Kasie Datun Kejaksaan Negeri Bogor
2. Direktur Keuangan RSJ Bogor
(RS Dr. Marzoeki Mahdi Bogor)
- Anggota** :
1. Kapolresta Bogor
 2. Kapolsekta Bogor Barat
 3. Komandan Kodim Kota Bogor
 4. Dandenspom Kota Bogor
 5. Danramil Bogor Barat
 6. Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Bogor
 7. Juru Sita Pengadilan negeri Bogor
(merangkap Koordinator lapangan)
 8. Kepala Satpol PP Kota Bogor
 9. Camat Bogor Barat
 10. Lurah Menteng Kecamatan Bogor Barat
 11. Kepala Bagian Pelayanan Hukum
 12. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan
 13. Kepala Bagian Kelembagaan
 14. Kepala Bagian Analisa Jabatan dan Tata Laksana



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

15. Kabag Orhukmas Setditjen Bina Yanmed
16. Kabag Umum dan Kepegawaian Setditjen Bina Yanmed
17. Kabag Perlengkapan Biro Keuangan dan Perlengkapan
18. Staf Kejaksaan Negeri Bogor
19. Staf Kejaksaan Negeri Bogor
20. Staf Kejaksaan Negeri Bogor
21. Staf RSJ Bogor (RS Dr. Marzoeki Mahdi Bogor)
22. Kasubag Bantuan Hukum Biro Hukum dan Organisasi
23. Kasubag Pertimbangan Hukum Biro Hukum dan Organisasi
24. Kasubag Penyusunan Perjanjian Biro Hukum dan Organisasi
25. Kasubag Hukum Setditjen Bina Yanmed

Sekretariat

- :
1. Staf Bagian Kelembagaan Biro Hukum & Organisasi
 2. Staf Bagian Pelayanan Hukum Biro Hukum & Organisasi
 3. Staf Bagian Pelayanan Hukum Biro Hukum & Organisasi
 4. Staf Bagian Hukormas Setditjen Bina Yanmed
 5. Staf RSJ Bogor (RS Dr. Marzoeki Mahdi)



Dr.dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K) 